

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Faisal, S. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadir, H. (1997). *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Produsen Makanan dan Minuman Terhadap Konsumen*. Jakarta: BPHN.
- Mansyur, M. A. (2004). *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Jawab Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Semarang: Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Miru, A., & dan Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, A. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Njatrijani, R. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang: CV. Tigamedia.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2004). *Edisi Revisi : Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Siahaan, N. (2005). *Hukum Konsumen "Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk"*. Jakarta: Panta Rei.
- Sidabalok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. &. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2003). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemarwoto, O. (1999). *Ekologi Pembangunan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.

- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Soeparno. (2015). *Ilmu dan Teknologi Daging Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (1981). *Perlindungan Konsumen Indonesia Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang - Undang Konsumen*. Jakarta: Yayasan Lembaga Indonesia.
- Zulham. (2016). *Edisi Revisi: Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Laporan

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2020). *Laporan Tahunan 2019*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kamus

- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*. St. Paul-Minnesota: West Publishing, Eight Edition.
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West, Ninth Edition.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

Internet

- islamiclogic.wordpress.com*. (2012, Desember 15). Diambil kembali dari *islamiclogic.wordpress.com*:
<https://islamiclogic.wordpress.com/2012/12/15/6-cara-membedakan-daging-sapi-dengan-daging-babi/>
- Nastiti, T. L. (2002, Mei 12). *sosok.grid.id*. Dipetik September 2020, dari *sosok.grid.id*: <https://sosok.grid.id/read/412147730/setahun-jualan-daging-sapi-oplosan-babi-dengan-rendaman-boraks-penjual-di-bandung-ini-sempat-nantang-balik-saat-ditegur-warga-soal-aktivitas-dagangnya>.
- Nazir, A. (2020, Mei 12). *jabar.tribunnews.com*. Dipetik September 2020, dari *jabar.tribunnews.com*: <https://jabar.tribunnews.com/2020/05/12/harga-daging-sapi-di-kota-bandung-turun-permintaan-di-ramadhan-tahun-ini>
- Permadi, A. (2020, Mei 12). *Kronologi Terbongkarnya Penjualan Daging Sapi yang Ternyata Babi di Bandung* Artikel ini telah tayang di *Kompas.com* dengan judul "*Kronologi Terbongkarnya Penjualan Daging Sapi yang Ternyata Babi di Bandung*", Klik untuk baca:
<https://regional.kompas.com/re>. Diambil kembali dari *Kompas.com*:

<https://regional.kompas.com/read/2020/05/12/03400071/kronologi-terbongkarnya-penjualan-daging-sapi-yang-ternyata-babi-di-bandung?page=all>

Tunardy, W. T. (2016, Juni 6). *Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*. Diambil kembali dari Jurnalhukum.com: <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>
<https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Jurnal

Rusli, T. (2012). Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Keadilan Progresif*, 3.1.
Atmakusumah, J. (2016). *Tata Niaga Peternakan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.